
AN NAHDLIYAH

JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

E-ISSN: 2830-5612

e-mail: annahdliyah@stainumalang.ac.id

MANAJEMEN KEUANGAN YANG EFEKTIF DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH/MADRASAH

Endang Sih Pujiharti

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang, 65152

e-mail: endangsihp@gmail.com

Abstract: Quality in education is the difference between success and failure. Quality education will be realized if in every process that exists in schools/madrasas in all fields also always maintains a culture of quality, including in the financial sector. Management/financial management is important and needs excellent attention from school/madrasah leaders. Effective financial management will have a good impact on the success of programs carried out by schools/madrasahs and can support quality learning activities. Educational financial management/management is based on the principles of transparency, accountability, effectiveness, and efficiency. There are 3 main groups in education financial management, namely: budgeting, accounting and auditing. Education funds apart from the government, local government and the community, schools must be able to provide funds independently to meet their needs through various activities that can increase the input of funds for schools/madrasas. Financial management is considered effective if it refers to the School Revenue and Expenditure Budget Plan (RAPBS). Finance in education must be managed effectively so that it can support the smooth running of all school/madrasah programs in an effort to improve the quality of education.

Keywords: Financial Management, Effectiveness, Quality of Education

Abstrak: Mutu dalam pendidikan merupakan hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Pendidikan yang bermutu akan terwujud apabila dalam setiap proses yang ada di sekolah/madrasah dalam semua bidang juga selalu menjaga budaya mutu, termasuk dalam bidang keuangan. Pengelolaan/manajemen keuangan merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang besar dari pimpinan sekolah/madrasah. Manajemen keuangan yang efektif akan dapat memberikan dampak yang baik bagi keberhasilan program-program yang dilakukan sekolah/madrasah, serta dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Pengelolaan/manajemen keuangan pendidikan berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Terdapat 3 kelompok utama dalam manajemen keuangan pendidikan yaitu: penyusunan/perencanaan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*) dan pemeriksaan (*auditing*). Dana pendidikan selain dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, sekolah harus mampu menyediakan dana secara mandiri untuk memenuhi kebutuhannya melalui berbagai kegiatan yang dapat menambah masukan dana bagi sekolah/madrasah. Pengelolaan keuangan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Keuangan dalam pendidikan harus dikelola secara efektif agar dapat mendukung kelancaran semua program sekolah/madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Kata kunci: Manajemen Keuangan, Efektif, Mutu Pendidikan

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan mutu, terutama jika mutu tersebut sudah menjadi kebiasaan kita. Namun, ironisnya, kita hanya bisa menyadari keberadaan mutu tersebut saat mutu tersebut hilang. Satu hal yang bisa kita yakini adalah mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara yang baik dan yang sebaliknya. Bertolak dari kenyataan tersebut, mutu dalam pendidikan akhirnya merupakan hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Sehingga mutu jelas

sekali merupakan masalah pokok yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang kian keras.¹

Terkait dengan mutu juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 30 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

Artinya:

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.²

Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa apabila kita melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya maka kita juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian pula dalam pendidikan, apabila kita membiasakan menjaga mutu dalam setiap kegiatan pendidikan mulai dari input, proses maupun hasil pendidikan dengan sebaik-baiknya, maka lembaga sekolah/madrasah akan menjadi sekolah yang bermutu.

Pendidikan yang bermutu akan terwujud apabila dalam setiap proses yang ada di sekolah/madrasah di semua bidang juga selalu menjaga budaya mutu, termasuk dalam bidang keuangan. Dalam bidang kegiatan apapun termasuk pendidikan, tidak satupun yang bisa terlepas dari masalah keuangan. Oleh karena itu keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap lembaga termasuk lembaga pendidikan. Keuangan merupakan faktor yang sangat perlu diperhatikan dalam menunjang terlaksananya semua program yang ada.

Rofiq dalam Arwildayanto menjelaskan uang merupakan sumber daya yang langka dan terbatas, oleh karenanya perlu dilakukan pengelolaan yang efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan.³ Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), salah satunya adalah pembiayaan. Oleh karena itu pengelolaan/manajemen

¹ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Pendidikan)*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), Cetakan IX, 30

² Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Per Kata (Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah)*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), Cetakan Ketiga, 297

³ Arwildayanto, Nina L., Warni T.S., *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: WidyaPadjadjaran, 2017), Cetakan Pertama, 1. <https://repository.ung.ac.id/get/kms/13824/buku-manajemen-keuangan-dan-pembiayaan-jilid-i.pdf>

keuangan merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang besar dari pimpinan lembaga pendidikan. Manajemen keuangan yang efektif akan dapat memberikan dampak yang baik bagi keberhasilan program-program yang dilakukan sekolah/madrasah, serta dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang berkualitas.

Menurut Depdiknas manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Manajemen keuangan sekolah /madrasah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah/madrasah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah/madrasah.⁴

Setiap sekolah/madrasah harus melakukan pengelolaan/manajemen keuangan secara efektif agar mampu mendukung dan menjadikan program-program sekolah yang bermutu, sehingga akan dapat meningkatkan mutu sekolah/madrasah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur/kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur baik buku-buku bacaan maupun dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan manajemen keuangan dan mutu pendidikan. Dari berbagai sumber bacaan tersebut, peneliti mendisripsikannya dalam bentuk laporan penelitian.

C. Pembahasan

1. Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan

Setiap lembaga pendidikan tidak akan terlepas dari sumber daya uang dalam operasionalnya. Agar semua kegiatan dalam lembaga dapat berjalan dengan baik dan dapat tercapainya tujuan pendidikan, maka harus dilakukan pengelolaan/manajemen yang efektif terkait dengan keuangan lembaga. Menurut Depdiknas manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Sedangkan manajemen keuangan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam menggerakkan para

⁴ Rusdiana, Wardija, *Manajemen Keuangan Sekolah (Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah)*, (Bandung: Arsad Press, 2013), Cetakan I, 2

bawahannya untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan keuangan (penganggaran), pengelolaan berupa pengeluaran (pencairan), penggunaan, pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu institusi (organisasi), termasuk di dalamnya lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan.⁵

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 26-27 dijelaskan tentang keuangan sebagai berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.⁶

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kita harus melakukan kewajiban yang menjadi tanggungjawab kita. dan kita tidak boleh boros dengan menghambur-hamburkan harta/uang yang kita miliki. Berarti kita dianjurkan untuk hidup hemat, hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan yang baik. Dalam kaitannya dengan pendidikan, sekolah /madrasah juga harus melakukan pengelolaan/manajemen keuangan dengan baik, efektif dan efisien.

Menurut Jones dalam Rusdiana, manajemen keuangan meliputi:

- a. Perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa efek samping yang merugikan.
- b. Pelaksanaan (*Implementation involves accounting*), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat.
- c. Evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.⁷

⁵ Arwildayanto, Op.Cit., 3

⁶ Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Per Kata (Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah)*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), Cetakan Ketiga, 284

⁷ Rusdiana, Op.Cit., 3

Rusdiana menyatakan kegiatan pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban dana, meliputi:

- a. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya, sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan.
- b. Penggunaan meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran, baik anggaran rutin maupun pembangunan.
- c. Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penganggaran.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban berfungsi untuk memeriksa terutama yang ditujukan pada berbagai masalah keuangan meliputi berbagai transaksi-transaksi yang telah dilakukan, apakah transaksi tersebut sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran.⁸

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan/penyusunan anggaran, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana pendidikan.

Sedangkan tujuan manajemen keuangan pendidikan seperti dikemukakan Tim Dosen Administrasi Pendidikan FIP UPI Bandung antara lain:

- a. Menjamin agar dana yang tersedia dapat dipergunakan untuk kegiatan lembaga pendidikan dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali,
- b. Memelihara barang-barang (*asset*) sekolah,
- c. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.⁹

2. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Menurut Rusdiana prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut dijelaskan prinsip-prinsip tersebut:

a. Transparansi

⁸ Ibid, 2-3

⁹ Arwildayanto, Op.Cit., 23

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Artinya harus ada keterbukaan di dalam pengelolaan/manajemen keuangan pendidikan, harus ada keterbukaan terkait dengan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Hal ini perlu dilakukan agar dapat meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah terhadap penyelenggaraan seluruh program sekolah/madrasah.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah/madrasah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah/madrasah membelanjakan uang secara bertanggungjawab. Tiga pilar utama agar terbangunnya transparansi yaitu: 1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah/madrasah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah/madrasah, 2) adanya standar kinerja yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, 3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana yang kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

c. Efektivitas

Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Manajemen keuangan dikatakan efektif kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari 2 hal yaitu:

1) Dari segi penggunaan waktu

Kegiatan dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.

2) Dari segi hasil

Kegiatan dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil yang sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.¹⁰

3. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Pendidikan

Dalam manajemen keuangan pendidikan terdapat 3 kelompok utama yaitu: penyusunan/perencanaan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), dan pemeriksaan (*auditing*), yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyusunan/perencanaan anggaran (*budgeting*)

Dalam penyusunan anggaran pendidikan tentu memperhatikan sumber keuangan pendidikan pada lembaga pendidikan itu sendiri, misalnya di sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren dan lainnya, yang menurut Depdiknas secara garis besar dapat dikelompokkan atas 3 sumber, yaitu: a) pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; b) orangtua atau peserta didik; c) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.

Penyusunan rencana anggaran lembaga pendidikan merupakan kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjukkan kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di lembaga pendidikan. Lipham dalam Arwildayanto menjelaskan bahwa perencanaan anggaran untuk mencapai tujuan berhubungan dengan anggaran (*budget*) sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Penyusunan anggaran lembaga pendidikan, terdiri dari perencanaan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, menilai pelaksanaan anggaran.¹¹

Sedangkan menurut Sri Minarti, perencanaan anggaran sekolah harus disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara

¹⁰ Rusdiana, Op.Cit., 27-31

¹¹ Arwildayanto, Op.Cit.,24

keseluruhan baik pengembangan jangka pendek maupun pengembangan jangka panjang.¹²

Dari pendapat-pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa penyusunan/perencanaan anggaran merupakan proses yang sangat penting untuk menentukan rencana alokasi dana keuangan sekolah/madrasah untuk masing-masing program agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Pembukuan (*accounting*)

Transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan bendaharawan sekolah senantiasa terjadi dari hari ke hari. Agar semuanya lancar, maka setiap pemasukan dan pengeluaran hendaknya dicatat secara tertib sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Maka salah satu tugas bendaharawan sekolah adalah mengadakan pembukuan keuangan sekolah. Pembukuan yang lengkap mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya dan distribusi penggunaannya secara rinci. Jika ada beban pajak juga harus disetor sesuai aturan yang berlaku.

Setiap transaksi yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran uang wajib dicatat oleh bendaharawan dalam buku kas. Buku kas meliputi: Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). BKU merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang menurut jenis sumber pembiayaan. Pencatatan dilakukan sepanjang waktu setiap ada transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. Pembukuan dilakukan di BKU kemudian di BKP. BKU dan BKP ditutup setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu, misalnya setelah ada pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, adanya serah terima jabatan Kepala Sekolah, atau pergantian bendaharawan sekolah/madrasah. Pembukuan anggaran BKU dan BKP ini harus dilakukan secara tertib, teratur, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menunjang terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik, Kepala Sekolah hendaknya memperhatikan hal-hal terkait dengan adanya tempat khusus untuk perlengkapan administrasi keuangan, Rencana Kerja Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS-M) yang sudah

¹² Sri Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 229

disahkan dan dapat digunakan sebagai acuan, dan memiliki pengadministrasian keuangan sekolah/madrasah.¹³

c. Pemeriksaan (*auditing*)

Pemeriksaan merupakan kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk melaksanakan audit diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus dapat diukur. Ada beberapa jenis pemeriksaan (*auditing*) keuangan yaitu:

1) Pemeriksaan (audit) laporan keuangan

Audit laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan merupakan informasi yang terukur dan sudah diverifikasi, disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.

2) Pemeriksaan (audit) operasional

Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi lembaga. Dalam audit operasional, tinjauan yang dilakukan tidak terbatas pada masalah-masalah akuntansi, tetapi juga meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi, pemanfaatan komputer, metode produksi, pemasaran dan bidang-bidang lain sesuai keahlian auditor. Efisiensi dan efektivitas operasi suatu organisasi jauh lebih sulit pengevaluasiannya secara obyektif dibandingkan penerapan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada prakteknya, auditor operasional cenderung memberikan saran perbaikan prestasi kerja dibandingkan melaporkan prestasi kerja yang sekarang. Sehingga audit operasional lebih merupakan konsultasi daripada audit.

¹³ Johannes M., Yuli C., Medira F., *Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah (Bahan Pembelajaran Diklat Calon Kepala Sekolah)*, (LPPKS Indonesia, 2013), 17-18. <https://katresna72.files.wordpress.com/2011/06/3-pengelolaan-keuangan-sekolah.pdf>

3) Pemeriksaan (audit) ketaatan

Audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah auditi (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Suatu audit ketaatan pada lembaga pendidikan, dapat termasuk penentuan apakah para pelaksana akuntansi pendidikan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga.¹⁴

4. Sumber-sumber Keuangan Pendidikan

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 46 disebutkan bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan dari pemerintah daerah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya melalui kebijakan pemerintah yang ada, sejak tahun 2007 di dalam pengelolaan keuangan dikenal sumber anggaran yang disebut Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Yang meliputi Administrasi umum, yaitu alokasi dari pemerintah yang bersumber APBN penerimaan dari pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari dana masyarakat.

Beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah/madrasah yang bisa menghasilkan pendapatan antara lain: 1) pengelolaan kantin sekolah/madrasah, 2) pengelolaan koperasi sekolah/madrasah, 3) pengelolaan wartel/warnet, 4) pengelolaan jasa antar jemput siswa, 5) panen kebun sekolah/madrasah, 6) kegiatan yang menarik sehingga ada sponsor yang memberikan dana, 7) kegiatan seminar/pelatihan/lokakarya dengan dana dari peserta yang bisa disisihkan sisa anggarannya untuk sekolah/madrasah, 8) penyelenggaraan lomba kesenian dengan biaya dari peserta atau perusahaan yang sebagian dana bisa disisihkan untuk sekolah/madrasah.¹⁵

Dalam setiap lembaga pendidikan termasuk lembaga sekolah/madrasah, pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu selain sumber dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, maka sekolah harus mampu menyediakan dana secara mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga Kepala Sekolah harus mampu menggerakkan, memberikan motivasi

¹⁴ Arwildayanto, Op.Cit., 29-30

¹⁵ Rusdiana, Op.Cit., 57-58

dan dorongan kepada warga sekolah untuk bekerjasama mewujudkannya. Berbagai usaha mandiri yang dapat dilakukan oleh sekolah/madrasah di atas, apabila terealisasi akan memberikan tambahan pemasukan dana bagi sekolah/madrasah.

5. Manajemen Keuangan Pendidikan yang Efektif

Pengelolaan keuangan akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran, para Kepala Sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
- b. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang.
- c. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun.
- d. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
- e. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan.
- f. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah.
- g. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang.¹⁶

6. Mutu Pendidikan

Secara umum mutu mengandung arti derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun *intangible*. Sedangkan dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada *input* pendidikan, proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu, *input* meliputi: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru),

¹⁶ Syaifullah, *Manajemen Keuangan Pendidikan*, *Scolae: Journal of Pedagogy*, Volume 4, Nomor 1, 2021, 15.
<https://media.neliti.com/media/publications/528822-none-02ac0ebe.pdf>

sarana sekolah, dukungan administrasi dan prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai *input* tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik dalam lingkup akademis maupun non akademis. Dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada tiap kurun waktu tertentu.¹⁷

Jadi mutu pendidikan dilihat dari semua elemen dalam pendidikan mulai dari *input* (masukan), proses serta hasil pendidikan. Budaya mutu harus dilakukan secara terus menerus. Sekolah/madrasah harus menetapkan standar mutu sebagai acuan untuk mengukur seberapa besar kualitas yang telah dicapai sekolah, baik dari segi *input*, proses maupun hasil pendidikan.

Sebagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan, lahirlah standar mutu. Untuk mencapai standar mutu lahirlah PP No. 19 tahun 2005, yang merupakan penjabaran dari UU No 20 tahun 2003 sebagaimana menurut HAR Tilaar bahwa adanya delapan standar nasional pendidikan dalam menciptakan peningkatan mutu, diantaranya: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standat penilaian pendidikan.¹⁸

Dari delapan standar nasional pendidikan dalam menciptakan peningkatan mutu di atas, salah satunya adalah standar pembiayaan. Sehingga pembiayaan atau keuangan dalam pendidikan harus dikelola secara efektif sehingga dapat mendukung kelancaran semua program sekolah/madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap sekolah / madrasah harus melakukan pengelolaan/ manajemen keuangan yang efektif agar semua kegiatan lembaga berjalan dengan baik dan dapat tercapainya tujuan.

¹⁷ Riyuzen Praja Tuala, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah*, (Lintang Rasi Aksara Books, 2018), 62-63

¹⁸ Mesiono, Haidir, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Aplikasinya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan)*, Hikmah, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2020, 62-63. <https://e-jurnal.staisumaterra-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/download/88/66>

2. Pengelolaan / manajemen keuangan pendidikan berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.
3. Terdapat 3 kelompok utama dalam manajemen keuangan pendidikan yaitu: penyusunan/perencanaan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*) dan pemeriksaan (*auditing*).
4. Selain dana dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, sekolah harus mampu menyediakan dana secara mandiri untuk memenuhi kebutuhannya melalui berbagai kegiatan yang dapat menambah masukan dana bagi sekolah/madrasah.
5. Pengelolaan keuangan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
6. Keuangan dalam pendidikan harus dikelola secara efektif agar dapat mendukung kelancaran semua program sekolah/madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan

Daftar Rujukan

- Arwildayanto (et.al.), *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2017)
- Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Per Kata (Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah)*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009)
- <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/download/88/66>
- <https://katresna72.files.wordpress.com/2011/06/3-pengelolaan-kuangan-sekolah.pdf>
- <https://media.neliti.com/media/publications/528822-none-02ac0ebe.pdf>
- <https://repository.ung.ac.id/get/kms/13824/buku-manajemen-keuangan-dan-pembiayaan-jilid-i.pdf>
- Johannes M., Yuli C., Medira F., *Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah (Bahan Pembelajaran Diklat Calon Kepala Sekolah)*, (LPPKS Indonesia, 2013).
- Mesiono, Haidir, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Aplikasinya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan)". Dalam: *Hikmah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Minarti, Sri, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
- Rusdiana, Wardija, *Manajemen Keuangan Sekolah (Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah)*, (Bandung: Arsad Press, 2013)
- Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Pendidikan)*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010)
- Syaifullah, "Manajemen Keuangan Pendidikan". Dalam: *Scolae: Journal of Pedagogy*, Volume 4, Number 1, 2021
- Tuala, Riyuzen Praja, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah*, (Lintang Rasi Aksara Books, 2018)

***Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem
Pendidikan Nasional***